

Keberdayaan Perempuan: Konsep Pemberdayaan dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender

Ernawati S. Kaseng*

Program Studi PTP, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*Corresponding Author, E-mail: ernawatisyahrudin71@unm.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Persentase jumlah kaum perempuan pun jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah kaum laki-laki, akan tetapi pada kenyataannya tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kerja laki-laki. Metode kajian yang digunakan, yakni metode studi pustaka dimana data yang diperoleh disusun, sehingga diperoleh kesimpulan. Tipe data, yaitu menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu melalui tahapan pengambilan data dari perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah data dari bahan yang diperoleh. Kajian artikel ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, konsep, strategi dan prinsip pemberdayaan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat yang berbasis gender. Melalui kegiatan pemberdayaan diharapkan terjadi pendidikan non formal untuk merubah pola pikir dan cara pandang perempuan atau ibu rumah tangga yang pada akhirnya akan mendidik mereka untuk tekun, kreatif dan inovatif untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan bakat yang dimiliki sehingga mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan terjadi peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Hal ini tentunya agar perempuan atau ibu rumah tangga dapat mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada suami guna memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya.

Kata Kunci: keberdayaan, perempuan, pemberdayaan, masyarakat, pembangunan

I. PENDAHULUAN

Perempuan sebagai bagian dari pembangunan nasional tersebut juga memiliki peranan penting. Perempuan memiliki sejumlah potensi, yang mana apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang sangat besar. Persentase jumlah kaum perempuan pun jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah kaum laki-laki, akan tetapi pada kenyataannya tingkat partisipasi kerja perempuan di Indonesia masih tergolong rendah apabila dibandingkan dengan tingkat kerja laki-laki. Perempuan sebagai bagian dari pembangunan nasional tersebut juga memiliki peranan penting. Perempuan memiliki sejumlah potensi, apabila dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak yang sangat besar. Pemberdayaan perempuan adalah usaha mengalokasikan

kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, konsep, strategi dan prinsip pemberdayaan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat yang berbasis gender dengan memperkuat unsur-unsur keberdayaan tersebut untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dan memandirikan perempuan.

Keberdayaan banyak dihubungkan dengan potensi yang dimiliki seseorang untuk membuat orang lain berubah. Fokus pemberdayaan adalah pada kemampuan individu, khususnya kepada kelompok yang rentan untuk dijadikan lebih mampu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan yaitu bebas

dari kelaparan, bodoh dan sakit. Pemberdayaan akan membuat individu lebih produktif dengan menambah pendapatan juga memperoleh barang/jasa yang diinginkan. Kemudian akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang telah tersedia dan keputusan yang bisa mempengaruhi mereka [1].

Melalui kegiatan pemberdayaan maka usaha untuk memenuhi dan mengembangkan potensi serta kebutuhan kelompok atau individu sampai masyarakat luas untuk memilih dan mengontrol lingkungan sekitarnya terkhusus sumber daya yang telah tersedia dengan pekerjaan dan aktivitas lapangannya. Hal terpenting dalam program pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat sendiri, sebab mereka yang paling mengetahui kebutuhannya. Selain itu, keterlibatan kalangan miskin sampai kelompok terpinggir lainnya juga berasal dari masyarakat dengan memperhatikan dampak yang akan terjadi pada lingkungan dan pelaksanaan pemberdayaan yang berkelanjutan (Mardikanto dalam Prasiasa, 2017). Dukungan pihak eksternal dengan tujuan untuk membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dapat dilakukan melalui daya dan optimasi serta peningkatan posisi tawar menawar yang dimiliki. Oleh karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan kelompok atau individu yang rentan agar lebih berdaya dan produktif dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya baik secara fisik, sosial maupun ekonominya secara mandiri.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk mengembangkan keterampilan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dalam seluruh aspek kehidupan. Pemberdayaan perempuan merupakan kegiatan refleksi, suatu proses yang mampu dipertahankan dan diinisiasikan hanya oleh agen atau subjek yang mencari kekuatan diri sendiri (*self determination*) [3]. Hal ini disebabkan perempuan dalam kehidupan di masyarakat sering kali di nomor duakan dalam bermacam macam kondisi baik dari segi pekerjaan maupun kedudukannya di dalam keluarga. Dalam keluarga perempuan biasanya hanya dilibatkan pada urusan mengurus rumah tangga seperti dapur, sumur, kasur dan kebanyakan membatasi perempuan dalam mengembangkan kreativitas perempuan untuk berkarya dan bekerja. Padahal tidak menutup kemungkinan perempuan juga bisa mengembangkan kreativitas dan membantu

perekonomian keluarga sebab memang kebanyakan perempuan yang banyak mengatur aktivitas ekonomi keluarga. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu proses peningkatan ekonomi keluarga [4].

Pemberdayaan sejatinya memiliki orientasi yakni bertumpu pada kemandirian (Malik & Mulyono, 2017) Dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan nasional (BAPPENAS) tahun 2000 - 2004 dan program pembangunan daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi sosial.

Untuk itu, melalui pemberdayaan dapat mendorong masyarakat dapat mandiri, mendorong masyarakat untuk memiliki potensi dalam menghadapi masalah masalah yang sedang dihadapi serta mampu untuk mencukupi kebutuhan sendiri dengan tidak bergantung kepada pihak luar seperti pada lembaga swasta maupun pemerintah. Pemberdayaan sosial pun bertujuan untuk memberikan solusi pada masalah masalah pribadi dalam melakukan tindakan (Ma'rif dkk, 2016).

II. METODE PENELITIAN

Kajian artikel ini menggunakan metode studi pustaka dimana data yang diperoleh disusun, sehingga diperoleh kesimpulan [6]. Tipe data, yaitu menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu melalui tahapan pengambilan data dari perpustakaan, membaca, mencatat, dan mengolah data dari bahan yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN

Arah dan Tahapan Pemberdayaan dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender

I. Arah Pemberdayaan Sebagai tujuan dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender

Menurut Mardikanto & Soebianto, (2017) tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan pendidikan (*better education*), salah satu tujuan pemberdayaan adalah memperbaiki pendidikan. Pemberdayaan

- akan membuat semangat belajar terus tumbuh selama seumur hidup.
2. Perbaikan aksesibilitas (better accessibility), memperbaiki akses merupakan suatu hal yang penting dan hal ini yang menjadi tujuan diselenggarakannya pemberdayaan yakni memperbaiki sumber informasi, sumber pembiayaan, peralatan dan penyedia produk serta institusi pemasaran.
 3. Perbaikan tindakan (better action), melalui upaya upaya seperti menyediakan bekal pendidikan, akses dengan sumber daya yang mumpuni, hal inilah yang diharapkan dapat menumbuhkan tindakan tindakan yang lebih baik.
 4. Perbaikan institusi (better institution), setelah upaya perbaikan tindakan dilaksanakan tujuan yang hendak dicapai selanjutnya adalah memperbaiki institusi dalam hal ini termasuk jaringan kerjasama usaha.
 5. Perbaikan pendapatan (better income), adanya sebuah bisnis yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan maka akan memperbaiki pendapatan pihak pihak di dalamnya. Dalam hal ini meliputi individu atau keluarga atau dalam lingkup yang lebih besar adalah masyarakat.
 6. Perbaikan usaha (better business), adapun dari upaya perbaikan pendidikan, akses, aktivitas, dan perbaikan institusi akhirnya diharapkan perbaikan dari berbagai jenis usaha yang digalakan.
 7. Perbaikan lingkungan (better environment), dari perbaikan pendapatan yang dilakukan diharapkan selanjutnya dapat memberikan perubahan yang lebih baik pada kondisi fisik dan sosial. Hal terjadi karena seiring kali kerusakan lingkungan disebabkan oleh tingginya kemiskinan dan rendahnya pendapatan.
 8. Perbaikan kehidupan (better living), setelah pencapaian perbaikan tingkat pendapatan dan lingkungan kearah yang lebih baik, maka selanjutnya akan terhubung pada keadaan hidup keluarga dan masyarakat kearah yang lebih baik dan semakin besar.
 9. Perbaikan masyarakat (better community), saat kehidupan yang lebih baik tercapai dengan kondisi lingkungan

yang baik pula, maka diharapkan terwujud masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan beberapa uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk mendorong masyarakat lebih berdaya dan mandiri melalui bantuan lembaga masyarakat sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi sosial masyarakat.

2. Tahapan Pemberdayaan dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender

Pada dasarnya tujuan diselenggarakannya pemberdayaan adalah untuk mengantarkan masyarakat pada kemandirian, sehingga dalam prosesnya pemberdayaan dikatakan telah selesai jika telah mencapai kemandirian. Maka, pemberdayaan memiliki tidak selamanya sifatnya melainkan hanya sampai pada tahap kemandirian masyarakat untuk kemudian dilepas secara mandiri. Namun, walaupun telah dilepas pengawasan dari jauh masih tetap dilakukan untuk memastikan aktivitasnya tidak berhenti dan jatuh (Mulyono, 2017).

Ada beberapa tahapan pemberdayaan untuk mencapai kemandirian masyarakat pemberdayaan. Tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan sebagai berikut:

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku
Tahap awal pemberdayaan adalah penyadaran dan pembentukan perilaku, tahap ini adalah tahap dimana persiapan dilakukan untuk menjalankan suatu pemberdayaan. Di tahap ini seorang pemberdaya mulai melakukan prakondisi. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar pemberdayaan bisa memfasilitasi berjalannya pemberdayaan yang lebih efektif.

Proses pada tahapan ini pemberdayaan dilakukan dengan memberikan arahan dan sentuhan bagi masyarakat agar keinginan dan kesadaran terkait kondisinya. Ketika masyarakat telah paham keinginan dan kesadaran akan membuat kondisi yang lebih baik kedepannya.

Peranan seorang fasilitator dan pendamping pada tahap ini sangat penting sebab pendamping yang akan memberikan masukan positif serta pengarahan pengalaman dan pengetahuannya. Selain itu, pendamping berperan pula sebagai tempat bertukar gagasan, pengetahuan, membangkitkan kesadaran, menyampaikan informasi dan pengalaman masyarakat yang sedang didampingi serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat (Rahmawati, Kisworo, 2017).

2) Tahap transportasi kemampuan

Pada tahap ini agar masyarakat dapat membentuk suatu kemampuan kemandirian maka dibutuhkan peningkatan kualitas serta kemampuan keterampilan yang dibutuhkan, tahap ini akan didukung setelah masyarakat telah sadar akan kemampuan masyarakat. Kemandirian masyarakat dalam hal ini adalah kemampuan untuk berinisiatif, berkreasi, dan terlibat dalam pembangunan. Konsep dalam pembangunan masyarakat adalah ketika sudah mampu mencapai taraf tersebut yang kemudian akan didudukkan sebagai pemeran dalam pembangunan. Selanjutnya pihak eksternal menjadi fasilitator.

3) Tahap peningkatan kemampuan dan inovatif

Tahap ini sangat diperlukan sebuah pengayaan kualitas dan keterampilan agar masyarakat bisa lebih mandiri. Kemandirian masyarakat didapatkan saat masyarakat sudah melahirkan kemampuan, inisiatif dan pembangunan sendiri. Dalam konsep pembangunan, saat masyarakat sudah mencapai taraf yang diperlukan maka sudah bisa dijadikan sebagai subjek dalam pembangunan. Hasil akhir yang diharapkan peran dari pihak eksternal hanya sebagai fasilitator saja.

Adapun menurut Soekanto, (1987) pemberdayaan meliputi beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap persiapan. Pada tahap ini hal yang harus dipersiapkan ada dua yaitu: Penyiapan petugas yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang biasanya dilakukan oleh pekerja komunitas dan penyiapan lapangan yaitu usaha usaha yang dilakukan secara non direktif.
- 2) Tahap pengkajian. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan kajian secara individual melalui kelompok masyarakat. Pada tahap ini petugas harus melakukan identifikasi apa yang menjadi masalah dan kebutuhan serta sumber daya yang dimiliki dalam masyarakat.
- 3) Tahap perencanaan/kegiatan. Pada tahap ini petugas secara partisipatif melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang ada dan cara mengatasinya. Pada tahap ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan program yang dapat dilakukan.
- 4) Tahap pemformalisasi rencana aksi. Pada tahap ini petugas membantu kelompok/lembaga untuk merumuskan untuk mengatasi masalah yang ada
- 5) Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan masyarakat diharapkan dapat terlibat dan

bekerja sama dengan petugas dalam program yang telah dilaksanakan

- 6) Tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan pengawasan dari warga dan petugas dalam program yang telah dilaksanakan. Keterlibatan warga diharapkan dapat membentuk sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dalam jangka waktu pendek serta dalam jangka waktu panjang dapat membangun komunitas/lembaga menjadi lebih memanfaatkan sumber daya yang ada.
- 7) Tahap terminasi. Pada tahap ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas/lembaga, untuk membiarkan masyarakat mandiri dalam melanjutkan pemberdayaan.

Adapun tahap pemberdayaan menurut Wrihatnolo, (2007) meliputi: Pertama tahap penyadaran, pada tahap ini target akan diberdayakan untuk disadarkan bahwa ada sejumlah hak dan potensi yang dimiliki. Kedua tahap pengkapasitasan, tahap ini adalah tahap memampukan atau diberi daya, untuk memberdayakan maka harus mampu dulu. Ketiga tahap pendayaan, tahap ini pemberian daya. Target pada tahap ini adalah diberikannya daya atau peluang.

Pendekatan dan Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender

I. Pendekatan dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender

Aktivitas pemberdayaan akan menjadi beda ketika ada sudut pandang yang berbeda tentang hakikat pemberdayaan. Adanya paham yang berbeda tentang hakikat pemberdayaan membuat dua sudut pandang menjadi kontradiktif satu sama lain yakni zero-sum dan positive sum (Suharto, 2013) . Pendekatan *zero-sum* menjelaskan bahwa pertemuan yang terjadi antara kelompok yang kuat dan lemah akhirnya akan membuat pengalihan kekuasaan terjadi yakni berkurangnya kekuatan pada kelompok yang sebelumnya kuat. Pendekatan *Positive-sum* menjelaskan hal berbeda dimana pertemuan antara kedua pihak justru akan saling menguatkan sehingga tidak ada dampak yang negatif yang ditimbulkan [5].

Dalam konsep pembangunan terdapat dua pendekatan yakni top down dan bottom up. Pendekatan top down umumnya memposisikan

pemerintah pada posisi paling atas sebagai pembuat gagasan untuk diterapkan di masyarakat yang berada di bawah tanpa harus menerima aspirasi masyarakat untuk diikutsertakan. Adapun dalam proses pembangunan dikenal pula pendekatan *bottom up* yakni sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali kemampuan, kebutuhan dan masalah dari masyarakat. Pendekatan ini tidak terpusat kepada salah satu pihak melainkan keduanya yaitu pemerintah dan masyarakat.

2. Model Pemberdayaan dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender

Model adalah benda pengganti untuk menggantikan benda yang sebenarnya yang nyatanya memiliki tujuan untuk digunakan sebagai media informasi untuk memaparkan konsep serta wawasan kedalam bentuk yang lebih sederhana, menarik dan jelas (Pribadi, 2017). Model adalah suatu hal atau bentuk yang memberi peluang untuk memecahkan problem yang ada [11]. Model merupakan suatu bentuk pengandaian yang menjelaskan hubungan antar variabel yang kompleks agar lebih sederhana, mudah dipahami dari objek yang telah mewakili kegiatan keseluruhan [12]. Maka berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa model merupakan acuan yang diwakilkan oleh objek pengganti untuk memperjelas objek yang sebenarnya.

Adapun beberapa model yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat menurut Jack Rothman dalam Suharto, (2014) antara lain :

1) Pengembangan Masyarakat lokal

Bentuk pemberdayaan ini merupakan pemberdayaan yang mengedepankan proses dalam menggerakkan berbagai potensi dan meningkatkan kesadaran masyarakat oleh pekerja sosial. Hal ini dilakukan sebagai sebuah solusi dalam mengatasi masalah ketidakberdayaan dalam masyarakat. Bentuk pemberdayaan ini lebih mengedepankan dalam menjadikan pekerja sosial serta elemen sosial lainnya sebagai agen dalam membangkitkan potensi masyarakat yang masih terpendam. Kepemimpinan lokal, peningkatan informasi, relasi, komunikasi dan partisipasi masyarakat adalah inti dari proses pengembangan masyarakat lokal yang memiliki nuansa *bottom up*.

2) Model perencanaan sosial

Model ini menunjuk pada proses pragmatis dalam menetapkan solusi dari masalah tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, buta huruf, kenakalan remaja, kesehatan masyarakat yang

buruk dan lain sebagainya. Berbeda dengan pengembangan lokal, perencanaan sosial lebih mengedepankan tujuan tugas. Bentuk pemberdayaan ini merupakan bentuk yang meletakkan masyarakat sebagai pihak yang dilayani karena ketidakmampuan dalam menangani persoalannya sendiri. Para penggerak atau perencana sosial dalam hal ini dilihat sebagai ahli untuk menganalisis problem, kebutuhan masyarakat, sampai pada tataran menyelenggarakan dan mengevaluasi kegiatan.

3) Model social action (aksi sosial)

Adapun tujuan utama aksi sosial adalah melakukan perubahan dalam kelembagaan dan struktur masyarakat melalui proses pendistribusian kuasa, sumber dan pengambilan keputusan. Bentuk pemberdayaan ini merupakan bentuk pemberdayaan yang memahami bahwa dalam masyarakat ada sejumlah potensi yang tidak diberdayakan/digerakkan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Masyarakat tidak berdaya karena tidak diberdayakan oleh kelompok elit masyarakat, ekonomi, politik dan kemasyarakatan. Maka dalam hal ini masyarakat diorganisir melalui beberapa kegiatan penyadaran.

Berkaitan dengan usaha pemberdayaan pada level masyarakat, Rothman mendeskripsikan bahwa langkah pemberdayaan komunitas/masyarakat melalui intervensi komunitas ini dapat dilaksanakan melalui beberapa model pendekatan intervensi. Menurut Rothman dan Tropman mengemukakan perbedaan ketiga model pemberdayaan tersebut menggunakan 12 variabel, adapun berikut penjelasannya :

1. Kategori tujuan tindakan terhadap masyarakat

Pada tabel dapat dilihat ada dua tujuan pokok tentang bagaimana masyarakat diorganisasikan yaitu lebih mengarah pada 'tugas' dan yang pada hal lainnya lebih mengarah pada 'proses'. Kategori tujuan yang berorientasi pada tugas yaitu model B, lebih berfokus pada penyelesaian tugas-tugas mereka atau memecahkan masalah yang mengganggu fungsi sistem sosial sebagai contoh penyediaan layanan yang baru atau terobosan dalam aspek perundang undangan sosial. Sedangkan model A dan model C lebih berorientasi pada tugas, lebih menekankan untuk meluaskan dan memelihara sistem yang memiliki tujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan mendorong masyarakat agar mempunyai minat dan partisipasi yang meluas terhadap isu sosial yang terjadi dalam komunitas.

2. Asumsi mengenai struktur komunitas dan kondisi permasalahannya

Pada Model A: dalam hal ini masyarakat sering dipandang sebagai ikatan tradisional yang dipimpin oleh kelompok kecil pemimpin konvensional. Masyarakat dipandang terdiri dari populasi yang buta huruf dan memiliki masalah dalam skill memecahkan masalah serta pemahaman mengenai proses demokrasi.

Pada Model B: seorang praktisi dalam hal ini melihat masyarakat sebagai suatu kondisi masalah sosial inti yang memiliki sifat khusus dengan kepentingan tertentu seperti masalah, pengangguran, perumahan, atau kesehatan.

Pada Model C: seorang perencana aksi sosial mempunyai metode berpikir yang berbeda, mereka lebih melihat masyarakat sebagai suatu hirarki dari privilege dan kekuasaan. Adapun sasaran dari mereka adalah masyarakat atau klien yang mendapat tekanan, diabaikan, tidak dapat keadilan, dan sebagainya.

3. Strategi perubahan dasar

Pada Model A: strategi perubahan dasar ditandai dengan ungkapan 'marilah kita bersama-sama'. Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dilihat akan adanya usaha untuk meningkatkan keterlibatan warga sebanyak-banyaknya untuk menentukan kebutuhan dan memecahkan masalah secara kolektif.

Pada Model B: strategi dasarnya ditandai dengan ungkapan 'marilah kita kumpulkan'. Seorang praktisi pada umumnya akan berupaya untuk mendapatkan fakta-fakta mengenai masalah yang dihadapi lalu kemudian memilih tindakan paling tepat dilakukan.

Pada Model C: strategi dasar dilihat dari ungkapan 'mari kita mengorganisir diri agar dapat melawan'. Ungkapan ini merupakan kristalisasi dari isu-isu yang tengah dihadapi oleh komunitas yang kemudian membuat mereka dapat mengenali 'musuhnya'.

4. Karakteristik taktik dan teknik perubahan

Pada Model A: caranya lebih dilakukan melalui pencapaian konsensus. Hal ini biasanya dilakukan melalui interaksi, komunikasi dan proses musyawarah yang melibatkan berbagai macam kelompok maupun individu.

Pada Model B: taktik dan metode yang sangat memiliki andil adalah melalui pengumpulan data dan skill untuk menganalisis, bisa juga taktik konsensus maupun konflik, tergantung pada hasil analisis yang dilakukan.

Pada Model C: para perencana aksi sosial lebih memfokuskan pada taktik konflik dengan cara melakukan konfrontasi dan aksi langsung.

5. Peran praktisi

Pada Model A: peran sebagai enabler adalah peran yang paling banyak dilakukan yakni menolong masyarakat agar dapat mengartikulasikan keperluan dan meningkatkan kemampuan mereka agar dapat mengatasi masalah yang tengah hadapi secara lebih efektif.

Pada Model B: peran yang biasa diberlakukan adalah sebagai pakar yang lebih memfokuskan pada penemuan fakta, mengimplementasikan program, dan hubungan dengan birokrasi. Pada Model C: adapun peran yang dilakukan lebih mengacu pada peran sebagai advokat dan aktivis.

6. Media Perubahan

Pada Model A: Media perubahannya adalah melalui kreasi dan manipulasi (positif) kelompok kecil yang berorientasi pada tugas.

Pada Model B: Media perubahannya adalah manipulasi lembaga seperti melalui pengumpulan data dan menganalisis data.

Pada Model C: media perubahannya adalah dengan membuat dan memanipulasi pengorganisasian dan pergerakan massa untuk mempengaruhi politis.

7. Orientasi terhadap struktur kekuasaan

Pada Model A: struktur kekuasaan sudah tercakup di dalam konsepsi mengenai komunitas itu sendiri. Setiap segmen komunitas dianggap sebagai bagian dari sistem klien. Anggota dari struktur kekuasaan diposisikan sebagai kolaborator dari ventura yang bersifat umum. Oleh karena itu hanya tujuan yang dapat memunculkan kesepakatan yang saling menguntungkan lah yang dapat diterima dan relevan sedangkan tujuan yang terlalu mencerminkan kepentingan segmen tertentu sering kali tidak diterima.

Pada Model B: struktur kekuasaan biasanya muncul sebagai sponsor dari perencana. Oleh karena itu Morris dan Binstock mengatakan bahwa sangat sulit bagi seseorang untuk membedakan antara para perencana dengan organisasi yang mempekerjakannya.

Pada Model C: struktur kekuasaan dianggap sebagai sasaran diluar dari suatu tindakan yang dilakukan. Struktur kekuasaan sering dianggap sebagai kekuatan antitesis yang akan menekan kelompok konstituen.

8. Batasan definisi sistem klien dalam komunitas (konstituensi)

Pada Model A: komunitas pada umumnya akan didasarkan pada satu kesatuan geografis seperti RT, RW, Desa atau Kota.

Pada Model B: klien bisa yang disasar merupakan kesatuan geografis yang juga memiliki kesatuan fungsionalnya (misalnya kelompok profesi dokter, kelompok pecinta buku, kelompok tuna grahita dsb)

Pada Model C: sasaran biasanya merupakan bagian dari komunitas yang membutuhkan bantuan. Mereka dapat disebut sebagai kelompok yang membutuhkan layanan tetapi tidak mendapatkan atau ditolak oleh layanan tersebut.

9. Asumsi mengenai kepentingan dari kelompok-kelompok di dalam suatu komunitas

Pada Model A: berbagai kelompok dan faksi dalam masyarakat yang dilihat dari dasar merupakan hasil permufakatan yang responsif terhadap pengaruh dari persuasi yang rasional, komunikasi dan berasal dari niat baik bersama.

Pada Model B: tidak ada asumsi yang akan membawa dampak secara mendalam ataupun konflik kepentingan. Pendekatan yang dilakukan lebih pragmatis dan berorientasi untuk menangani masalah tertentu. Oleh karena itu permufakatan ataupun konflik dapat diterima dalam pendekatan ini selama tidak menghalangi proses pada tujuan yang ingin dicapai.

Pada Model C: ada pendapat bahwa kepentingan dari masing aspek dalam komunitas sangat bermacam-macam dan sulit diambil kata mufakat sehingga seringkali cara koersif harus dilaksanakan seperti melalui pemboikotan sebelum penyesuaian dapat terjadi.

10. Konsepsi mengenai populasi klien (konstituensi)

Pada Model A: klien atau masyarakat dilihat sederajat yang juga mempunyai kekuatan yang perlu diperhatikan tetapi belum semuanya dapat dioptimalkan dan difokuskan pada skill klien.

Pada Model B: masyarakat dilihat sebagai konsumen dari suatu program atau layanan yang diadakan dan mereka akan menerima serta memanfaatkan program dan layanan sebagai hasil dari proses perencanaan.

Pada Model C: klien lebih dilihat sebagai korban dari suatu sistem.

11. Konsepsi mengenai peran klien

Pada Model A: peran klien dipandang sebagai partisipan yang aktif dalam proses interaksi antara satu dengan yang lainnya.

Pada Model B: klien memiliki peranan sebagai pihak yang menerima layanan. Klien aktif menggunakan layanan yang diberikan namun tidak dalam proses menentukan tujuan dan kebijakan.

Pada Model C: klien biasanya merupakan 'bawahan' yang kemudian bersama dengan perencana aksi sosial. mereka berupaya untuk 'mendobrak' sistem yang ada.

12. Pemanfaatan pemberdayaan (pemberdayaan digunakan untuk)

Pada Model A: pemberdayaan dilakukan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar bisa mengambil keputusan secara kolektif serta mampu membangkitkan rasa percaya diri akan keterampilan atau kemampuan masing-masing anggota masyarakat.

Pada Model B: pemberdayaan digunakan untuk mencari tahu dari para pengguna jasa tentang layanan/program apa yang dibutuhkan, serta memberikan info para pengguna jasa tentang pilihan jasa layanan yang tersedia.

Pada Model C: pemberdayaan digunakan sebagai sarana untuk meraih kekuasaan yang objektif bagi masyarakat yang tertindas sehingga dapat memilih dan memutuskan cara yang tepat demi melaksanakan aksi, serta meningkatkan rasa percaya diri partisipan akan kemampuan mereka.

Bentuk Kegiatan Pemberdayaan dan Aktor dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender

Pemberdayaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan secara intensif dan menyeluruh sampai ambang batas tercapainya keseimbangan dinamis antara pemerintah sampai seluruh aspek yang diperintah. Adapun bentuk/program pemberdayaan dari berbagai konsep pemberdayaan masyarakat yang ada menurut Jamaluddin, (2016) sebagai berikut:

1. Bantuan modal

Modal adalah salah satu hal yang dihadapi masyarakat sehingga tidak berdaya. Kurangnya modal membuat masyarakat tidak berdaya untuk melakukan sesuatu untuk diri dan lingkungan. Adapun upaya pemberdayaan masyarakat melalui permodalan adalah: (1) pemberian bantuan modal dengan tidak membuat masyarakat bergantung; (2) membuat suatu lingkungan kondusif baru melalui usaha kecil maupun menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3)

skema penggunaan modal tidak terjebak pada perekonomian subsistem.

2. Bantuan pembangunan prasarana

Prasarana dibutuhkan untuk membantu masyarakat agar lebih berdaya. Adanya prasarana di tengah masyarakat yang tidak berdaya akan mendorong timbulnya potensi yang dimiliki masyarakat sehingga aktivitas yang dilakukan menjadi mudah.

3. Bantuan pendampingan

Adapun tujuan adanya pendampingan adalah untuk memfasilitasi proses belajar serta menjadi mediator masyarakat. Selain itu, bantuan pendampingan akan membawa masyarakat pada peningkatan kemampuan dan keterampilan.

4. Kelembagaan

Lembaga adalah satu unsur penting dalam menciptakan keberdayaan masyarakat. Adanya lembaga akan mempermudah masyarakat untuk berkoordinasi dan dilatih untuk hidup dengan tertib. Selain itu, fungsi dari adanya lembaga adalah memberikan kemudahan dalam melakukan akses yang diinginkan seperti media musyawarah, permodalan, dan lainnya.

Menurut Jamaluddin (2016) aktor di dalam pemberdayaan ada 2 sebagai berikut :

1) Pemerintah. Peranan pemerintah sangat penting sehingga pejabat pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi. Upaya yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah dalam menjalankan perannya adalah:

- Memahami keinginan dan peka pada masalah yang sedang dihadapi rakyat.
- Membangun partisipasi masyarakat dengan cara memberikan kepercayaan untuk memperbaiki diri lalu pemerintah membantu memecahkan masalah yang tengah dihadapi.
- Menyiapkan masyarakat dari segi pengetahuannya sehingga pemberdayaan dapat berjalan efektif.
- Membuka dialog dengan masyarakat agar pemerintah bisa segera memberikan bantuan jika terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri.
- Membuka jalur informasi yang diperlukan
- Menciptakan kebijakan yang memihak masyarakat.

2) LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). LSM memiliki potensi yang cukup besar. LSM berfungsi sebagai pelaksana program yang mewakili pemerintah, konsultan pemerintah dan membantu rakyat dalam program

pemerintah. Selain itu, LSM juga dapat mengembangkan programnya sendiri.

Prinsip Pemberdayaan dan Beberapa Faktor Yang Berpengaruh dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender

1. Prinsip Pemberdayaan

Adapun menurut Drijver dan Sajise dalam Jamaluddin (2016) prinsip pemberdayaan ada 5 macam yaitu:

1) Bottom Up Approach (pendekatan dari bawah)

Dalam hal ini para stakeholder telah setuju pada tujuan yang ingin dicapai agar kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa aktivitas setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2) Participation (Partisipasi)

Dalam prinsip partisipasi dalam setiap kegiatan seluruh aktor yang terlibat sama sama memiliki kekuasaan dalam setiap perencanaan dan pengelolaan.

3) Konsep keberlanjutan

Merupakan konsep pengembangan jaringan kemitraan di dalam masyarakat sehingga program pembangunan masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara sosial maupun ekonomi.

4) Keterpaduan

Keterpaduan dalam hal ini strategi maupun kebijakan dilaksanakan pada tingkat lokal, regional dan nasional.

5) Keuntungan sosial dan ekonomi

Dalam hal ini keuntungan sosial dan ekonomi adalah bagian dari program pengelolaan.

Menurut Oselin (2019) prinsip pemberdayaan yaitu: pertama, prinsip kesetaraan. Dalam pemberdayaan posisi masyarakat dan lembaga swadaya atau kelompok yang terlibat dalam pemberdayaan adalah sejajar dan tidak ada yang mendominasi. Kedua, partisipatif. Pemberdayaan harus melibatkan masyarakat dengan bebas untuk menentukan pilihan yang tepat untuk diri sendiri sehingga dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap evaluasi hasil pembangunan. Ketiga, keswadayaan. Dalam pemberdayaan pengembangan kemampuan dan kemandirian adalah hal yang utama bukan hanya sekedar memberikan bantuan finansial. Selain itu kunci utama untuk penumbuhan kapasitas berasal dari

dalam komunitas dampingan hal inilah yang disebut swadaya. Keempat, keberlanjutan. Pemberdayaan adalah program yang harus terus berproses dan berkelanjutan sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Umumnya dalam aktivitas pemberdayaan aka ada hal yang mendukung dan menghambat. Faktor pendukung merupakan bentuk faktor yang bersifat membantu perkembangan dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Sedangkan, faktor penghambat adalah segala sesuatu yang membuat kegiatan terkendala dan tidak dapat diwujudkan. Menurut Margayaningsih, (2018) adapun faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan ibu rumah tangga sebagai berikut:

1) Faktor pendukung

a. Motivasi

Motivasi merupakan hasrat yang berasal dari internal (dalam) dan eksternal (luar) individu. Hal ini ditandai dengan adanya keinginan dan minat, kebutuhan sampai penghormatan. Motivasi menjadi hal yang membuat seseorang bertindak.

b. Kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang dikeluarkan melalui perundang undangan, surat keputusan menteri dan pejabat pemerintah dan sebagainya. Hal ini merupakan arahan yang harus diperhatikan serta diperhitungkan oleh lembaga dalam pengembangan sumber daya manusia.

2) Faktor penghambat

a. Anggaran

Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh aktivitas perusahaan yang dinyatakan ke dalam bentuk unit dan berlaku dalam jangka waktu tertentu.

b. Sarana dan prasarana

Sarana merupakan sesuatu yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan. Prasarana adalah alat pelengkap dari sarana.

Beberapa Penelitian Pemberdayaan dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Gender

Model Pemberdayaan Perempuan melalui Program Daur Ulang Sampah Plastik di Wilayah Cilincing Jakarta Utara pada Masa Pandemi Covid 19 (Yuningsih dkk, 2021). Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

partisipasi, mekanisme dan model pemberdayaan perempuan melalui program daur ulang sampah plastik serta faktor peluang dan pendukungnya. Hasil penelitian : (1) Partisipasi perempuan berkembang mencapai 50 nasabah (2) Mekanisme pemberdayaan melalui tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, (3) Model pemberdayaan perempuan melalui program Bank Sampah kasih mandiri dilaksanakan di rumah masing-masing. (4) Faktor pendukung meliputi faktor internal, seperti semangat dan kemauan, sedangkan faktor eksternal seperti tersedia sarana dan prasarana, media dan kerjasama dengan pengurus bank sampah. Faktor penghambat meliputi pemasaran yang kurang berkembang dan kurangnya minat menggunakan produk daur ulang sampah. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah perempuan dan pengelola bank sampah.

Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Kasih Mandiri Cilincing Jakarta Utara. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian serta hasil yang ingin dicapai dimana pada penelitian ini dilaksanakan di Bank Sampah Sipakarannu Kelurahan Sambung Jawa Kota Makassar dan fokusnya ada mengetahui model dan faktor penghambat dan pendorong pemberdayaan ibu rumah tangga dalam kolaborasi pengelolaan sampah di bank sampah.

Pemberdayaan Perempuan pada Bank Sampah Flamboyan Indah Kota Jakarta Utara [17]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan dan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh ibu PKK melalui bank sampah Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa mekanisme bank sampah dilakukan dengan bantuan ibu PKK untuk menggerakkan pengumpulan sampah. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendamping, pengurus, kader PKK dan nasabah bank sampah. Penelitian ini dilakukan di Bank Sampah Flamboyan Jakarta Utara. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian serta hasil yang ingin dicapai dimana pada penelitian ini yaitu Bank Sampah Kelurahan Sambung Jawa dan fokusnya adalah mengetahui model dan faktor pendorong dan penghambat pemberdayaan dalam pengelolaan sampah. Sedangkan persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji pemberdayaan perempuan dan sama sama memakai metode kualitatif.

Model Pemberdayaan Komunitas Lelang Brownies Shodaqoh dalam Memberdayakan Kaum Dhuafa di Kabupaten Banyumas (Istiqomah, 2020). Tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui bagaimana upaya dan model pemberdayaan komunitas lelang brownies shadaqoh. Lokasi dilaksanakan di kabupaten banyumas dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian didapatkan bahwa pemberdayaan berjalan baik dengan upaya pemberdayaan informal. Adapun model pemberdayaan yang dilaksanakan adalah model pengembangan lokal. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah fokus penelitian yang lebih dititikberatkan pada model pemberdayaan ibu rumah tangga serta faktor penghambat dan pendorong. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dan mengkaji tentang model pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir [18]. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai. Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun yang membedakan penelitian kajian terdahulu dengan penulis yaitu penelitian terdahulu meneliti tentang Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lembah Damai. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang pemberdayaan ibu rumah tangga dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Bank Sampah Kelurahan Sambung Jawa. Penelitian penulis menitikberatkan masalahnya pada pemberdayaan ibu rumah tangga di bank sampah.

Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengembangan Kampung Wisata Tematik (Studi di Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang) [19]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan kampung wisata tematik KWJ serta dampak pemberdayaan berbasis pengembangan kampung wisata tematik terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat Jodipan. Hasil penelitian didapatkan bahwa model pemberdayaan yang digunakan adalah model pengembangan masyarakat lokal yang didukung oleh struktur pengurus dengan program pembaharuan cat, pembaharuan, pengecatan dan kerjasama pihak luar. Informan yang digunakan adalah pemerintah dan tokoh masyarakat. Adapun perbedaan penelitian terletak fokus penelitian yang membahas tentang pemberdayaan

ibu rumah tangga dalam hal kolaborasi pengelolaan sampah serta bertempat di bank sampah kelurahan Sambung Jawa kota Makassar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama memakai metode kualitatif dan membahas tentang model pemberdayaan serta faktor penghambat dan pendorongnya.

V. KESIMPULAN

Perempuan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan penting dan memiliki sejumlah potensi. Potensi tersebut apabila dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang sangat besar. Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keluarga dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, konsep, strategi dan prinsip pemberdayaan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat yang berbasis gender. Memberdayakan Perempuan melalui Pembangunan masyarakat berbasis gender adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan tersebut untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, dan memandirikan Perempuan.

Keberhasilan program pemberdayaan perempuan yang tergabung dalam kelompok-kelompok atau organisasi pemberdayaan dalam rangka pembangunan masyarakat berbasis gender, merupakan wadah komunitas perempuan yang saat ini semakin terlihat semakin eksis dapat dijadikan sebagai wahana pemberdayaan perempuan khususnya dalam hal kegiatan perekonomian yang dapat menjadikan perempuan memiliki posisi tawar di hadapan publik. ditujukan untuk mendidik masyarakat khususnya Perempuan atau ibu rumah tangga agar mereka dapat mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada suami guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Melalui Pendidikan non formal maka perubahan pola pikir dan cara pandang perempuan atau ibu rumah tangga pada akhirnya akan mendidik mereka untuk tekun, kreatif dan inovatif untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan bakat yang dimiliki sehingga mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan dan terjadi peningkatan pendapatan ekonomi keluarga.

REFERENSI

- [1] Suharto, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [2] Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- [3] Kemensos, *Efektivitas Model Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan sosial, 2012.
- [4] Nurazizah, "Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan bank sampah ngudi makmur dusun serut, desa ponjong, kapanewon ponjong, kabupaten gunung kidul, daerah istimewa Yogyakarta.," *J. Gend. Fam. Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2021.
- [5] Mulyono, "Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Jalur Pendidikan Non Formal di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang," *J. Pendidik. Nonform. dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 3, no. 3, pp. 51–60, 2011.
- [6] Mardalis, "Penelitian Suatu Pendekatan Proposal," *Bumi Aksara*, vol. 26, 1989.
- [7] Rahmawati, "Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan," *J. Non Form. Educ. Community Empower.*, vol. 1, no. 2, pp. 161–169, 2017.
- [8] Soekanto, *Sosial Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- [9] Wrihatnolo, "Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Disertasi," *Makassar Univ. Hasanuddin.*, pp. 39–40, 2007.
- [10] Pribadi, *Media dan Teknologi Dalam Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- [11] Ardial, *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- [12] Sulaeman, *Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan: Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press., 2012.
- [13] Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT, 2014.
- [14] Jamaluddin, *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- [15] Margayaningsih, "Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa. Jurnal Publiciana," *J. Publiciana*, vol. 11, no. 1, pp. 72–88, 2018.
- [16] Yuningsih, "Model Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Daur Ulang Sampah Plastik Di Wilayah Cilincing Jakarta Utara Pada Masa Pandemi Covid 19.," 2021.
- [17] Pratama, "Pemberdayaan Perempuan Pada Bank Sampah Flamboyant Indah Kota Jakarta Utara.," *Skripsi. Jakarta UIN Syarif Hidayatullah.*, 2021.
- [18] Hayrani, *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2019.
- [19] Wati, "Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pengembangan Kampung Wisata Tematik (Studi di Kampung Warna Warni Jodipan Kota Malang)," *Skripsi. Malang Univ. Muhammadiyah Malang.*, 2018.